

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS KELURAHAN SUKAMAJU
KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG**

Oleh :

Nama : Bulan Tri Agustina Sianipar

Nim : 20.11.071

Program Studi : Administrasi Negara

ABSTRACT

Tri Agustina Sianipar Month, 2024 Implementation of the Family Hope Program (PKI-I) in Improving Community Welfare (Case Study in Sukamaju Village, Sako District, Palembang City, Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). Main Supervisor (I) Rohmial, S.E., M.Si and Assistant Supervisor (II) Drs. H. Adenan Zachri, M.Si

This research was carried out in Sukamaju Village, Sake District, Palembang City Beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) in Sukamaju Village, Sako District, Palembang City and to find out what factors are obstacles to the acceptance of the Family Hope Program for beneficiary families. The method used in this research is a qualitative method with data collection techniques used were observation, interviews and documentation.

The results of the analysis of this research were the implementation of the family of hope program for recipients of the benefits of the family of hope to improve their lives in Sukamaju Village, Sako District, Palembang City. Based on PERMENSOS No.11 tahun 2018 article 2 paragraph (1) concerning the family hope program (PKH) and Law no. 11 Article 1 paragraph (1) of 2009 concerning community welfare. The Family Hope program is good, but in the implementation of receiving PKH assistance in the field there are still things that are not on target, and for the welfare of the community in Sukamaju sub-district, it is good with health, education and social welfare assistance.

Then what is an inhibiting factor in implementing PKH is the lack of socialization from assistants and lack of awareness for people who depend on government programs.

Keywords: Implementation (PKH), Community Welfare, Sukamaju Village

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia, jumlah penduduk yang banyak membuat negara Indonesia masuk dalam peringkat negara termiskin di dunia dalam urutan ke-91 dan Indonesia terus berusaha untuk membenahi diri dalam melakukan pembangunan di segala sektor. Dengan adanya pembangunan tersebut bisa mengubah setiap aspek kehidupan negara dari kondisi yang ada kearah yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Salah satu tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah masalah pengentasan masyarakat kurang mampu.

Permasalahan masyarakat kurang mampu memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh untuk menghindari kemungkinan merosotnya mutu generasi dimasa mendatang. Dalam upaya mengurangi masyarakat kurang mampu juga perlu

dilakukan pendekatan kemanusiaan yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan kesejahteraan melalui peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, serta penyediaan jaminan dan perlindungan sosial.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi masalah yang disebabkan oleh kemiskinan salah satunya kebijakannya yaitu membuat Program Keluarga Harapan (PKH) ini dibuat untuk masyarakat dengan tingkat cluster 1 atau masyarakat kurang mampu permasalahan yang dominan timbul dari bantuan sosial ini biasanya ialah sumber dari penerima yang tidak tepat sasaran, dimana target utama dari program ini adalah keluarga yang kurang mampu tetapi beberapa fakta di lapangan membuktikan bahwa keluarga penerima manfaat adalah keluarga yang berkecukupan dibidang ekonomi.

Program keluarga harapan menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan pasal 2

ayat 1 menyatakan program keluarga harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang yang kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) ini maka dilakukan pelaksanaan yaitu proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yang berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dengan terlaksananya program tersebut maka akan timbul kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik lagi, menurut UU No. 11 pasal 1 ayat(1) tahun 2009 Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Program keluarga harapan ini yang dibuat pemerintah juga dirasakan oleh masyarakat kurang mampu yang ada di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang. Di kelurahan sukamaju sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 20.862 jiwa, dan memiliki jumlah 67 RT dan 11 RW, adapun dengan jumlah penerima manfaat program keluarga harapan sebanyak 649 KK (enam ratus empat puluh sembilan Keluarga) tingkat pendidikan anak-anak mereka masih rendah atau hanya sampai SD, SMP dan SMA saja yang lanjut di Perguruan Tinggi hanya sedikit kurang lebih 620 jiwa, tamatan SD ada 4.463 tamatan SMP ada kurang lebih 4.243 dan SMA 4.622 jiwa. Melihat kenyataan yang terjadi menunjukkan adanya indikasi bantuan yang tidak tepat sasaran, seperti masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang, yang seharusnya tidak layak menerima bantuan dari pemerintah karena masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus menerima bantuan dari Pemerintah lagi terlihat dari keadaan rumah yang layak huni memiliki kendaraan roda dua lebih dari 1 bahkan ada pula yang memiliki kendaraan roda 4 bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya sampai sekolah ke perguruan tinggi.

Melihat latar belakang masalah diatas, penulis akan memilih judul skripsi mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di

Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang).

Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian yang telah dilakukan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang)?
2. Apa saja faktor penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang)?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang)
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang)

B. LANDASAN TEORI

Dalam setiap penelitian, kerangka teori digunakan untuk memberikan landasan atau dasar berpijak yang dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah kerangka teori dimaksudkan untuk memberi gambaran atau batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan peneliti yang akan dilakukan yaitu teori konsep-konsep permasalahan yang akan diteliti.

Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti menjalankan/melakukan suatu kegiatan. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan/ pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah siap.

1. Pelaksanaan

Adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melak-

sanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

2. Tujuan Pelaksanaan

Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim.

3. Fungsi Pelaksanaan

Proses pelaksanaan program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 Ayat 1 menyatakan program keluarga harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang yang kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Menurut Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan adalah program bagi keluarga miskin atau rentan yang ditunjuk sebagai penerima bantuan atau manfaat dari PKH. Rencana tersebut dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memberikan kesempatan kepada keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan di sekitar mereka. Manfaat program keluarga harapan (PKH) juga mulai mencakup penyandang disabilitas dan lansia dengan tetap menjaga tingkat manfaat sosial mereka.

1. Tujuan Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan memiliki tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dibidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok rumah tangga tidak mampu (RTTM) dan keluarga sangat tidak mampu (KSTM). Adapun tujuan khusus dari PKH adalah antara lain :

- a. PKH mengarah pada kelompok yang sangat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga dalam meningkatkan pengeluaran konsumsi.
- b. PKH diharapkan dapat merubah sikap keluarga sangat tidak mampu dalam memeriksa ibu hamil/nifas/balita ke fasilitas kesehatan dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan/dalam jangka panjang, PKH pun diharapkan dapat memutuskan mata rantai masyarakat yang tidak mampu antar generasi.
- c. Meningkatkan status sosial ekonomi RTM.
- d. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
- e. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTM.
- f. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak RTM

2. Fungsi Program Keluarga Harapan

Fungsi Program Keluarga Harapan yang dimaksud penulis bahwa PKH ini adalah sebuah program yang mana program ini memberikan bantuan-bantuan sosial terhadap masyarakat yang kurang mampu, seperti bantuan modal usaha, bantuan untuk biaya pendidikan dan sebagainya.

2. Kriteria Penerima PKH

Program keluarga harapan bersasaran pada keluarga yang tidak mampu di Indonesia. Penerima bantuan PKH adalah rumah tangga sangat tidak mampu (RTSTM) yang memiliki anggota yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih.

Berikut ini adalah siapa saja yang bisa mendapatkan penerima PKH.

1. Kriteria komponen kesehatan

Agar memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Maka kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti di bawah ini:

1. Anak Usia 0-6 Tahun:

Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.

2. Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak,

Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.

3. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yakni bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
4. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiapbulan untuk dilihat tumbuh kembangnya atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/*Early Childhood Education*) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

b. Ibu Hamil dan Ibu Nifas:

1. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
2. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
3. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan atau diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI.

2. Kriteria komponen pendidikan :

Peserta PKH diwajibkan untuk memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yaitu kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapa catatan seperti di bawah ini:

- a. Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar atau sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- b. Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak Peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Paket A atau SMP/MTs/ SMLB/ Paket A atau SMP/MTs Terbuka).
- c. Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan untuk mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
- d. Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan

keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.

- e. Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) bisa juga telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.
 - f. Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak.
3. Lansia 70 tahun keatas dan disabilitas
 - a. Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia).
 - b. Mengikuti kegiatan sosial (*day care*).
 - c. Penyandang Disabilitas Berat.
 - d. Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
 - e. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*).

Jika persyaratan di atas kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur dan memiliki hak-hak sebagai anggota, hak-hak peserta PKH yaitu:

- a. Mendapatkan bantuan uang non tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- b. Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- c. Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
4. Besaran Bantuan

Dalam upaya berkelanjutan untuk memerangi kemiskinan diseluruh penjuru Indonesia, pemerintah telah mengumumkan pencairan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) ada 4 tahapan pencairan bantuan Pada tahun 2021 bantuan sosial PKH dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. bantuan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Adapun bantuan akan dilakukan pertriwulan yakni Januari, April,

Juli dan Oktober. Bantuan ini disalurkan melalui PT POS Indonesia atau penyaluran langsung ke rumah penerima manfaat akan tetapi skema ini khusus untuk mereka dengan akses terbatas, seperti lansia, penyandang disabilitas dan masyarakat yang dikawasan tertinggal, terluar dan terdepan.

Adapun besaran bantuan kriteria penerima manfaat PKH :

- a. Ibu Hamil/Nifas sebesar Rp 3.000.000
- b. Anak Usia Dini sebesar Rp 3.000.000
- c. Anak SD sebesar Rp 900.000
- d. Anak SMP sebesar Rp 1.500.000
- e. Anak SMA sebesar Rp 2.000.000
- f. Lansia 70 tahun keatas sebesar Rp 2.400.000
- g. Disabilitas sebesar Rp 2.400.000

Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Jadwal pembayaran di masing-masing kecamatan yang diputuskan oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/ Kota setelah berkoordinasi dengan Lembaga Pembayaran.Dana Bantuan Tunai langsung dibayarkan kepada Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Kantor Pos Pengurus Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada Lembaga Pembayar dan diambil langsung oleh Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Pada saat pembayaran pendamping wajib memastikan kesesuaian antara Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Kartu Identitas (KTP) serta mengumpulkan bukti pembayaran.

5. Pemanfaatan PKH

Program keluarga harapan diharapkan dapat digunakan dengan bijak bagi penerimanya. PKH dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesehatan keluarga merupakan transportasi ke layanan kesehatan, makanan bergizi, dan kebutuhan perlengkapan kesehatan.
- b. Peningkatkan pendidikan anak merupakan peningkatan transportasi ke sekolah, pendidikan, dan biaya ekstrakurikuler, dan kebutuhan peralatan sekolah.
- c. Mengurangi beban keluarga dan pendapatan, PKH bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga, ditabung dan modal usaha.

Indikator Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Pedoman Umum (2016) yaitu :

1. Meningkatkan pendidikan yaitu dengan adanya kebijakan Program Keluarga Harapan maka diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi pembelajaran, sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat meraih pendidikan setidaknya pendidikan sampai SMA.
2. Meningkatkan kesehatan yaitu dengan kebijakan Program Keluarga Harapan dapat

memberikan manfaat untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan juga untuk anak balita 0-6 tahun.

3. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi yaitu dengan adanya kebijakan Program Keluarga Harapan maka diharapkan kehidupan masyarakat untuk bisa lebih baik dari sebelumnya.
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan yaitu dengan adanya kebijakan Program Keluarga Harapan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mempermudah mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Kesejahteraan Masyarakat

Menurut UU No. 11 pasal 1 ayat(1) tahun 2009 Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan adalah perpaduan kondisi fisik dan mental manusia baik positif (senang) senang, makmur dan negatif (sakit, ketidaknyamanan). Kesejahteraan dapat menjadi dasar untuk tujuan hidup manusia serta merasa mampu untuk mencapai tujuan pribadi dan berpartisipasi dalam kelompoknya masing-masing.

Mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut dilaksanakan berbagai upaya, program dan kegiatan tersebut “Usaha Kesejahteraan Sosial” baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang No.11 Tahun 2009 bagian II pasal 25 juga menjelaskan secara tegas tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- c. Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
- e. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Tahapan dan indikator pemenuhan kebutuhan keluarga sejahtera berdasarkan data dari BKKBN sumber Google :

<https://www.bkkbn.go.id/data/Documents/Profil%2520Hasil%2520Pendataan25202013> adalah sebagai berikut:

a. Keluarga Pra-Sejahtera

Pra-Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Indikator Keluarga Pra-Sejahtera meliputi:

1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
2. Seluruh anggota keluarga makan dua kali atau lebih dalam sehari.
3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda (pakaian ganti) untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian).
4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sarana kesehatan.

b. Keluarga Sejahtera 1

Keluarga Sejahtera 1 yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Keluarga Sejahtera 1 yakni keluarga yang kebutuhan dasar telah terpenuhi namun kebutuhan sosial psikologi belum terpenuhi. Indikator Keluarga Sejahtera 1 sebagai berikut:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
2. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging, ikan atau telur.
3. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
4. Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap pengguna rumah.
5. Seluruh anggota keluarga sehat dalam tiga bulan terakhir.
6. Paling kurang satu anggota keluarga yang umurnya diatas 15 tahun punya penghasilan tetap.
7. Seluruh anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin.
8. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah.
9. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga pasangan usia subur memakai alat kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

c. Keluarga Sejahtera

Keluarga Sejahtera yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya. Indikator Keluarga Sejahtera meliputi:

1. Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
2. Keluarga mempunyai tabungan.
3. Keluarga biasanya makan bersama minimal sekali dalam sehari.
4. Turut serta dalam kegiatan masyarakat.
5. Keluarga mengadakan rekreasi bersama minimal sekali dalam 6bulan.
6. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/televisi/majalah.
7. Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi.
8. Memberikan sumbangan secara teratur dan sukarela untuk kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
9. Aktif sebagai pengurus yayasan/instansi

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang)

Meskipun terdapat program pemerintah yang sangat baik untuk mengurangi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami menemukan bahwa masih terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Pedoman ini menimbulkan hambatan bagi program itu sendiri dan bagi para asisten sosial yang melaksanakannya di lapangan. Pedoman program telah dirancang dan diperbarui agar konsisten dengan berbagai kendala yang ditimbulkan oleh evaluasi hasil dan proses kompleks yang dilakukan. Hambatan-hambatan tersebut dapat menjadi penghambat keberhasilan implementasi bahkan dapat berujung pada kegagalan implementasi.

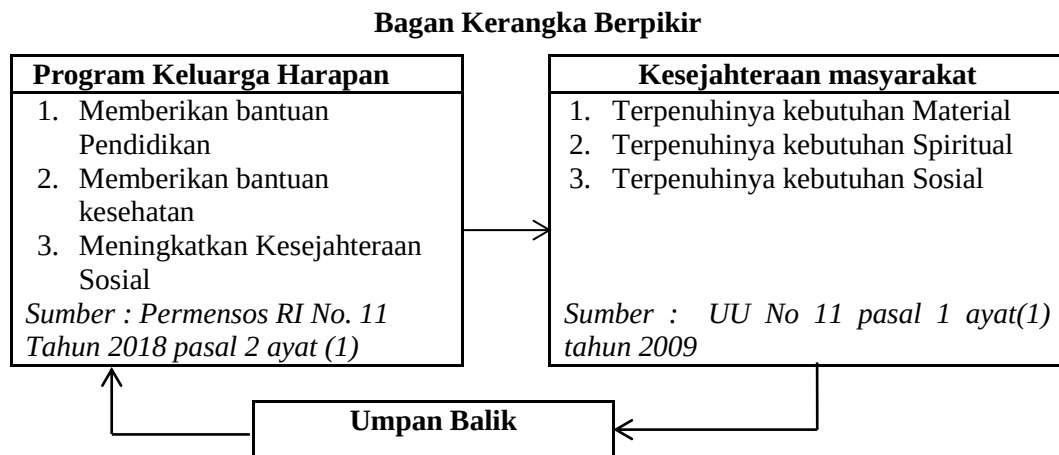
Apa saja hambatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu :

- a. Kurangnya sosialisasi dari pendamping dikarenakan sedikitnya sumber daya pelaksana, yang dimaksud ialah pendamping PKH yang hanya berjumlah 2 pendamping yang harus mengawasi 649 KPM di Kelurahan Sukamaju.
- b. Kurangnya dukungan dari aparat desa
- c. Kesulitan teknis dari segi komunikasi yang kurang, komunikasi dan koordinasi antara aparat pelaksana dan pendamping PKH dengan

masyarakat luas masih belum terjalin dengan baik.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang cara teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



Sumber : Diolah Peneliti 2023

PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran pemahaman yang mendalam tentang gambaran sosial, dalam hal ini pelaksanaan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung survey atau terjun langsung ke lokasi penelitian yang dilakukan dimana data dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan temuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Definisi Konsep

Konsep mengacu pada kerangka konseptual atau menggambarkan secara abstrak yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan apa yang diteliti mengenai kejadian, keadaan, kelompok, individu yang menjadi perhatian kesejahteraan masyarakat, intervensi sosial dan yang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program. Oleh karena itu untuk mendapatkan batasan yang jelas dari

masing-masing konsep yang akan diteliti, maka peneliti akan mengemukakan definisi konsep dari penelitian yaitu :

1. PKH adalah program perlindungan yang dibuat pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat tidak mampu, supaya masyarakat dapat bertahan dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari dan mendapatkan kepercayaan diri untuk bersosialisasi kepada lingkungannya.
2. Kesejahteraan adalah terpenuhinya suatu kebutuhan kehidupan untuk bisa bertahan hidup dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga mendapat-kan kebahagiaan dan dapat memenuhi atau mencukupkan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Definisi Operasional

Menurut Husein Umar (2008:125) definisi operasional merupakan penentuan suatu objek sehingga menjadi variabel maupun variabel-variabel yang dapat diukur.

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator	Sub Indikator
1.	Program Keluarga Harapan <i>Sumber : Permensos RI No 1Tahun 2018 pasal 2 ayat (1)</i>	1. Memberikan bantuan Pendidikan 2. Memberikan bantuan kesehatan 3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	a. Pemberian bantuan sosial dalam pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat supaya tidak ada lagi yang buta aksara. b. Pemberian bantuan layanan kesehatan untuk membantu meringankan dan mempermudah dalam mengakses kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan c. Meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.
2.	Kesejahteraan Masyarakat.	1. Terpenuhi kebutuhan material	Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan

	Sumber : Peraturan Pemerintah UU No 11 pasal 1 ayat(1) tahun 2009	2. Terpenuhinya kebutuhan spiritual 3. Terpenuhinya kebutuhan sosial	mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
--	---	---	---

Informan Penelitian

Informan atau narasumber penelitian adalah seorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Informan dalam

penelitian terdiri dari Lurah, Pegawai, Pendamping, RT, dan masyarakat di Kantor Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang. Untuk lebih jelas jumlah informan penelitian dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Lurah Sukamaju	1 orang
2.	Kasi Pemerintahan Kesejahteraan Masyarakat	1 orang
3.	Pendamping	1 orang
4.	Ketua RT	1 orang
5.	Masyarakat	2 orang
Jumlah		6 orang

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:194) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah :

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229), observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang mempunyai ciri khas dibandingkan metode lainnya. Pengamatan tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga benda-benda alam lainnya

b. Wawancara

Menurut Hasan (2002:85) adalah suatu teknik pengumpulan data dimana responden diberikan pertanyaan dan jawabannya disimpan langsung atau tidak langsung pada suatu sumber data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) dokumentasi adalah perolehan data dari buku-buku dan arsip dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumen penelitian ini diperoleh dari pendamping PKH dan perangkat desa Sukamaju di Kecamatan Sako Kota Palembang, serta literatur terkait yang berjudul penelitian ini.

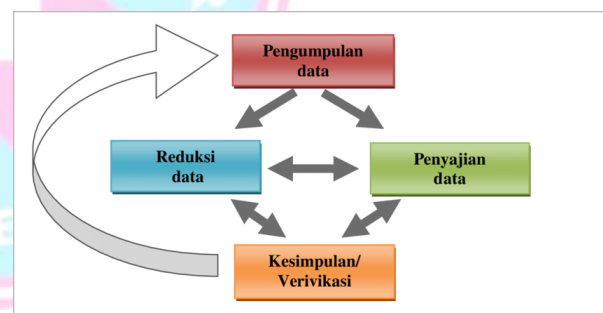
d. Studi pustaka

Menurut Sugiyono (2012:291) adalah kajian teoritis, bibliografi, dan literatur ilmiah lainnya mengenai budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh hasil data digunakan teknik analisis data dengan mengolah data tersebut menjadi informasi. Dalam metode analisis data Sugiyono (2016: 60), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu.

Gambar Teknik Analisis Data



Adapun model yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dilapangan dengan menggunakan model interaktif dalam penelitian ini yang menggunakan Model Miles dan Huberman (2007;173-174) untuk analisis data sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data Analisis model awal mengumpulkan data dari wawancara, observasi, dan berbagai dokumen dengan menggunakan klasifikasi sesuai pertanyaan penelitian, kemudian untuk mempertajam data melalui eksplorasi data lebih lanjut.

2. Reduksi Data

Reduksi Data Reduksi data adalah tahap pemilihan data yang ditemukan yang memenuhi syarat penelitian. Kajian ini menemukan berbagai data di lapangan, dengan cermat menyeleksi dan menyederhanakan data yang diperoleh, yaitu merangkum dan memilih data yang paling penting, memusatkan perhatian pada data yang penting, serta memungkinkan peneliti dan peneliti mempertimbangkan secara cermat catatan-catatan yang diambil pada setiap kontak dengan orang diterima oleh informan.

3. Data display (penyajian data)

Penyajian Data Setelah reduksi, dilakukan penyajian data untuk mengemas data secara visual agar mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat tentatif dan akan berubah jika pada tahap pengumpulan data selanjutnya tidak ditemukan bukti substansial yang mendukungnya. Kesimpulan data apabila didukung dengan bukti-bukti yang jelas dan tepat maka dapat menjawab rumusan masalah sebagaimana yang dirumuskan semula.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penulis melakukan penelitian di kelurahan sukamaju kecamatan sako kota Palembang yaitu meneliti tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Pada Bab ini seluruh data yang diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga studi pustaka terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 Ayat 1 dalam meningkatkan kesejahteraan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang.

Sebelum melakukan wawancara secara langsung dengan informan program keluarga harapan (PKH) terlebih dahulu peneliti menyiapkan diri serta beberapa instrument wawancara. Peneliti melakukan observasi awal yaitu penelusuran terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) yang ada di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang.

Berdasarkan hasil observasi, kehadiran program keluarga harapan (PKH) ditengah-tengah masyarakat miskin memang sangat membantu dalam meningkatkan beban tanggungan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti terbantunya keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan, pendidikan, pangan, ibu hamil, anak bayi, lansia dan disabilitas. Dengan demikian PKH merupakan program yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pegawai Kelurahan Sukamaju dan penulis juga memperoleh data dari pendamping PKH Sukamaju, Ketua RT dan juga beberapa penerima bantuan di Kelurahan Sukamaju.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang).

Dalam pelaksanaan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan di Kelurahan Sukamaju dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Memberikan Bantuan Pendidikan

Pemberian bantuan sosial dalam pendidikan sangat menentukan kebutuhan hidup untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat supaya tidak ada lagi yang buta aksara, dan bisa mempermudah mencari pekerjaan yang lebih baik. Pendidikan juga menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan bagi rakyat Indonesia, pemerintah di Indonesia menganjurkan anak-anak harus wajib sekolah 12 (dua belas) tahun dengan itu pemerintah mengeluarkan program sekolah gratis dan bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu dengan bantuan dari program keluarga harapan (PKH) yang dirasakan dan dinikmati di Kelurahan Sukamaju Kecamatan sako Kota Palembang.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang bahwa program keluarga harapan (PKH) dalam bantuan pendidikan sudah cukup baik akan tetapi dalam pelaksanaan program masih ada yang belum merata sesuai persyaratan yang menjadi kriteria pemerintah sehingga masih ada kurangnya kerjasama masyarakat dalam menerima bantuan itu sendiri supaya program ini sesuai sasaran yang ditetapkan.

2. Memberikan Bantuan Kesehatan

Pemberian bantuan layanan kesehatan untuk membantu meringankan dan mempermudah dalam mengakses kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, bantuan kesehatan ini dirasakan oleh masyarakat di kelurahan sukamaju.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang bahwa dalam program bantuan kesehatan sudah baik, sehingga masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan dan berobat gratis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dalam program keluarga harapan merupakan kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara dalam hal ini kondisi tersebut dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Sukamaju

Berdasarkan hasil dari observasi, dokumentasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di kelurahan sukamaju bahwa program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang sudah cukup baik, akan tetapi dalam penerimaan manfaat masih kurang tepat sasaran yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan tepat guna nya program tersebut.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dapat menjadi dasar untuk tujuan hidup manusia serta merasa mampu untuk mencapai tujuan pribadi dan berpartisipasi dalam kelompoknya masing-masing, menurut UU No. 11 pasal 1 ayat (1) tahun 2009 Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan material

Dalam kebutuhan material itu sendiri ialah sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat seperti rumah layak huni, makanan dan pakaian dan lain sebagainya di kelurahan sukamaju.

Berdasarkan hasil dari observasi, dokumentasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Sukamaju bahwa terpenuhinya kebutuhan material dalam kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako

Kota Palembang sudah baik, sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan material masyarakat.

2. Terpenuhinya kebutuhan spiritual

Berdasarkan hasil dari observasi, dokumentasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di kelurahan sukamaju bahwa kebutuhan spiritual kesejahteraan masyarakat di kelurahan sukamaju kecamatan sako kota Palembang sudah cukup baik, sehingga masyarakat dapat menemukan makna dan tujuan hidup yang baik lagi.

3. Terpenuhinya kebutuhan sosial

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial yang berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya di kelurahan sukamaju.

Berdasarkan hasil dari observasi, dokumentasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di kelurahan sukamaju bahwa kebutuhan sosial, kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang sudah baik, sehingga masyarakat dapat berfungsi secara optimal sebagai makhluk sosial.

Adapun hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebenarnya sudah baik terlaksanakan, akan tetapi ada hasil dari wawancara informan mengatakan bahwa dalam penentuan penetapan penerima program keluarga harapan masih ada yang kurang tepat sasaran tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Pembahasan

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat kembali pada teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini peneliti menggunakan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan pasal 2 ayat 1 dan UU No. 11 pasal 1 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial selanjutnya digunakan sebagai indikator untuk Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang).

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penrima manfaat PKH yang mempunyai komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program keluarga harapan juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Keberhasilan program keluarga harapan dapat dilihat berdasarkan tingkat pencapaian :

1. Tepat sasaran adalah program keluarga harapan (PKH) hanya diberikan kepada rumah tangga miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
2. Tepat jumlah adalah program keluarga harapan (PKH) diberikan sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
3. Tepat guna adalah program keluarga harapan (PKH) diberikan kepada penerima manfaat atau keluarga miskin dan digunakan dengan sebagaimana mestinya tujuan dari program keluarga harapan tersebut.
4. Tepat waktu adalah pembagian dari program keluarga harapan (PKH) dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, maka penulis akan membahas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang) dengan menggunakan teori menurut Permensos RI No. 1 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) yang mempunyai 3 konsep antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan Bantuan Pendidikan

Berdasarkan dengan teori yang ada bahwa bantuan pendidikan merupakan program dari pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang di berikan kepada keluarga penerima manfaat yang benar-benar kurang mampu untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, bantuan pendidikan ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) kemudian pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bantuan pendidikan telah didapatkan oleh masyarakat Kelurahan Sukamaju, prgoramnya sudah baik, membantu masyarakat atau orangtua yang ingin anaknya mendapatkan sekolah yang tinggi atau bisa di sebut mendapatkan pendidikan wajib sekolah 12 tahun, akan tetapi ketika dilapangan ada

salahsatu informan mengatakan bahwa bantuan pendidikan masih belum tepat sasaran di karenakan masih ada masyarakat yang sebenarnya mampu memberikan pendidikan kepada anak nya masih menerima bantuan dari program tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas sejalan dengan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu tentang program keluarga harapan (PKH) yang di atur dalam Permensos RI No. 11 tahun 2018. Bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bantuan pendidikan harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak mengalami kendala seperti standar yang diinginkan tidak sesuai dengan data para penerima bantuan pendidikan yang tidak tepat sasaran yaitu masyarakat yang sebenarnya mampu masih saja berusaha ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah yang tidak sesuai dengan kriteria yang disarankan, seharusnya penerima program keluarga harapan (PKH) adalah apabila keluarga tersebut memang benar keluarga tidak mampu dan atau anak tersebut anak jalanan (AJ) dan telah menigggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada dinas sosial dan dinas pendidikan di tingkat Kota/Kabupaten untuk mendapatkan bantuan dari program kesejahteraan sosial anak yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

2. Memberikan Bantuan Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, oleh sebab itu dengan adanya pemberian bantuan kesehatan pada penerima manfaat program keluarga harapan(PKH) sehingga masyarakat bisa mendapatkan bantuan dalam melakukan cek kesehatan atau pengobatan bagi mereka yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Sukamaju tentang bantuan kesehatan yang didapatkan oleh masyarakat kelurahan sukamaju sudah sangat baik, dikarenakan adanya bantuan layanan kesehatan yaitu untuk di lingkungan kelurahan sukamaju sendiri ada bantuan layanan kesehatan seperti Posyandu yang kegiatannya dilakukan 1(satu) bulan sekali dan ada juga Pustu dan Puskesmas yang dibuka setiap hari senin sampai dengan hari sabtu jam kerja menyesuaikan hari kerja.

Berdasarkan hasil penelitian diatas sejalan dengan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu tentang program keluarga harapan (PKH) penerimaan bantuan kesehatan dimana menurut Permensos RI No. 11 tahun 2018

program keluarga harapan di bagi menjadi 3 bagian yaitu tentang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan yang didapatkan di Kelurahan Sukamaju sudah baik, dikarenakan masyarakat mendapatkan bantuan kesehatan baik di puskesmas, rumah sakit atau juga bantuan pos pelayanan terpadu (Posyandu) yang dapat di nikmati oleh masyarakat sebagai penerima bantuan kesehatan.

Adapun layanan kesehatan yang di dapatkan oleh masyarakat di Kelurahan Sukamaju dalam menunjang kesehatan masyarakat yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Posyandu bertujuan untuk mencegah peningkatan angka kematian ibu dan anak saat kehamilan ,persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat.

Pada kelurahan sukamaju sendiri memiliki 16 posyandu dengan 5-8 Kader per posyandu dengan jumlah sekitar 88-95 kader. Adapun layanan posyandu ini juga gratis tidak dipungut biaya apapun dan tenaga kader perposyandu juga tidak ada gaji atau insentif apapun ini dikerjakan benar-benar secara sukarela tanpa upah apapun dari pemerintah.

Pada kesempatan ini peneliti di izinkan untuk bisa mengikuti kegiatan layanan kesehatan pada Posyandu Harapan Bunda di RT 49. Berikut adalah foto kegiatan peneliti di Pos Layanan Kesehatan (Posyandu).

Gambar Kegiatan Bantuan Layanan Kesehatan Di Posyandu Harapan Bunda RT049 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang



Sumber : penulis 7 mei 2024

Berdasarkan hasil peneliti dalam pemberian bantuan kesehatan ini di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang sudah sangat baik, penerima manfaat di Kelurahan Sukamaju terdata pada tahun terakhir 2018 ada sekitar 3.432 penerima manfaat yang mendapatkan bantuan program layanan kesehatan dengan gratis dengan fasilitas yang diberikan sesuai kebutuhan penerima layanan kesehatan dan masyarakat pun mengakui

sangat terbantu dengan adanya program layanan kesehatan pada PKH tersebut.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan dimana masyarakat merasa sejahtera pada umumnya yaitu meliputi jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan juga memberantaskan keburukan sosial. Dalam terpenuhinya kesejahteraan terdapat juga fasilitas kesehatan dan juga pendidikan pelaksanaan program keluarga harapan menjadi penunjang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial juga dapat meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Sukamaju peneliti membahas tentang pelaksanaan Program keluarga Harapan(PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang) kesejahteraan masyarakat sudah cukup baik dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Sukamaju dengan adanya kegiatan gotong royong, toleransi, penerimaan bantuan kesehatan dan pendidikan seperti program keluarga harapan yang di dapatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan dengan teori yang ada dimana kesejahteraan masyarakat dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Sukamaju dengan adanya toleransi partisipasi bagi sesama yang membuat masyarakat menjadi percaya diri dan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas sejalan dengan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri sudah hampir terlaksana dengan baik dibantu adanya program keluarga harapan(PKH) terdata pada tahun 2022 dari 649 (enam ratus empat puluh sembilan) keluarga penerima manfaat menjadi 283(dua ratus delapan puluh tiga) atau sekitar 43,6% terdata pada tahun 2023 peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat dari prasejahtera menjadi sejahtera I keluarga penerima manfaat yang membantu meringankan beban pada rumah tangga miskin, artinya masyarakat di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang sebagian dari penerima manfaat PKH tersebut ada pada tahap sejahtera I, adapun program keluarga harapan kesejahteraan ini memang harus dirasakan oleh kalangan masyarakat yang kurang mampu, dimana masyarakat sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bergantung dari program tersebut.

Kesejahteraan Masyarakat Dalam Terpenuhi-nya Kebutuhan Material, Spiritual dan Kebutuhan Sosial

Dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat juga harus memiliki akses yang memadai terhadap barang dan sumber daya material yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keinginan mereka juga bisa diartikan memiliki cukup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan barang-barang lain yang diperlukan sehingga dapat hidup secara layak sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat kebutuhan material itulah sangat diperlukan bagi keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang peneliti membahas tentang kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan juga kebutuhan sosial, adanya bantuan program keluarga harapan dapat menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat yang ada dilingkungan kelurahan sukamaju yang sudah memenuhi kriteria saja akan tetapi masih ada saja masyarakat yang memanfaatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak sesuai harapan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas sejalan dengan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yang di atur dalam UU No. 11 pasal 1ayat (1) tahun 2009 yaitu tentang kebutuhan kesejahteraan masyarakat terpenuhi dengan baik dalam hal material, spiritual dan juga fungsi sosial mereka terpenuhi dengan cukup dan diperhatikan dengan baik oleh aparat setempat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat penerima manfaat mengacu pada keadaan di mana seseorang merasa puas dan seimbang secara batin, percaya diri memiliki koneksi yang mendalam dengan diri sendiri, orang lain, alam, atau dimensi spiritual lainnya masyarakat juga merasa pencarian makna, tujuan hidup, kedamaian dalam diri, dan pengalaman emosi positif seperti rasa syukur, kebahagiaan, dan kepuasan yang bersumber dari nilai-nilai spiritual dan kepercayaan yang diyakini individu.

Dalam hal ini juga adapun salah satu hal yang menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat adalah kegiatan gotong royong, gotong royong dilakukan di lingkungan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang yang di adakan setiap minggunya oleh kelurahan, kegiatan gotong royong dilakukan bergantian setiap minggunya per RT dan 1bulan sekali tingkat kecamatan mengingat

di Kecamatan Sako ada 4 kelurahan jadi tingkat kecamatan diadakan 1bulan sekali dan pada kesempatan pada minggu ini kegiatan gotong royong berada dilingkungan RT 010 RW 006 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang.

Gotong royong adalah salah satu cara terbaik untuk membangun rasa kebersamaan diantara anggota masyarakat dengan gotong royong masyarakat belajar bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan bersama, baik itu memperbaiki infrastruktur, merayakan acara budaya, atau mengatasi masalah sosial.

Pada kesempatan ini peneliti di izinkan untuk mengikuti kegiatan gotong royong yang diadakan di RT 010. Berikut adalah foto kegiatan gotong royong yang di ikuti oleh peneliti.

Gambar Kegiatan Gotong Royong Tingkat Kecamatan di RT 010 RW 006 Kelurahan Sukamaju



Sumber : Penulis 05 Mei 2024

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang)

Walaupun sudah ada program yang sangat baik dari pemerintah dalam rangka upaya mengurangi masyarakat yang tidak mampu atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ternyata masih ada faktor penghambat dari Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Hambatan terjadi karena kebijakan dari program itu sendiri dan pendamping sosial sebagai pelaksana program di lapangan. Kebijakan program telah dirancang dan diperbaharui sedemikian rupa sesuai evaluasi yang telah dilakukan dari hasil dan berbagai kendala yang timbul akibat proses yang rumit kendala tersebut menjadi penghambat dalam keberhasilan suatu pelaksanaan bahkan dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan tersebut. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu kurangnya sosialisasi dari pendamping dikarenakan sedikitnya sumber daya pelaksana, yang dimaksud ialah pendamping PKH yang hanya berjumlah 1 pendamping yang harus mengawasi

649 KPM pada tahun 2022 di Kelurahan Sukamaju kemudian kurangnya dukungan dari aparat desa.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian sesuai bab penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat mengambil simpulan dan memberikan saran yang diharapkan menjadi manfaat bagi instansi Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang.

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang) dapat menarik simpulan dan saran sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Permensos tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang yaitu tentang keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah baik, terlihat selama setahun (2022 sd.2023) dari jumlah penerima PKH sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan) keluarga penerima manfaat menjadi 283 (dua ratus delapan puluh tiga) keluarga penerima manfaat, namun dalam penerima manfaat masih ada yang belum sesuai dengan kebijakan atau belum tepat sasaran dalam penerima bantuan program keluarga harapan(PKH) masih ada keluarga yang tidak berhak menerima atau keluarga yang kategorinya mampu malah menerima bantuan program keluarga harapan (PKH).
- b. Faktor penghambat dari pelaksanaan Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan (PKH) yang dilakukan oleh Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang adalah pendataan masyarakat yang kurang akurat dan kurangnya sosialisasi serta dukungan dari pendamping dan aparat setempat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah di kemukakan diatas, sehingga penulis dapat memberikan saran sebagai pertimbangan pada pihak pendamping, aparat setempat dan penerima manfaat yaitu masyarakat di Kelurahan Sukamaju :

1. Diharapkan kedepannya keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang supaya dapat memanfaatkan bantuan sebaik mungkin untuk tidak disalah

gunakan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Diharapkan kepada pihak pendamping dan aparat setempat kedepannya untuk lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan sosialisasi juga dukungan kepada masyarakat, juga mengarahkan masyarakat supaya lebih memfokuskan pada penyadaran keluarga penerima manfaat supaya tidak ada lagi ketergantungan terhadap bantuan atau program yang diberikan oleh pemerintah.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dalam Suyanto. 2014. Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium II. Yogyakarta: Adi Cita. Hlm 151.
- Edi Suharto. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Rcfika Aditama.
- Hasan. M. Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Husein umar. 2008, Strategic Management In Action,jakarta: PT Gramedia
- P. Siagian Sondang. 2006. Teori dan Kepemimpinan. Pcnrbit Rineka Cipta. Jakarta
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Penerbit Buku UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Sedarmayanti, M.Pd, APU 2009. Sumber daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung Penerbit Mandar Maju.
- Supardi. Dkk. 2023. Buku Pedoman Skripsi STIA Satya Negara
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung
- . 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung
- Suparlan, Parsudi. 2006. Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor.
- Tjokroadmujoyo dalam Dwi Purnama Wati. 2014. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam. Lampung: Universitas Lampung. Hlm 7.

Peraturan Pemerintah:

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor, tahun 2018 tentang PKH pasal 2 Ayat 1

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011:347)

UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

UU No. 11 Tahun 2009 bagian II pasal 25 "Usaha Kesejahteraan Sosial"

Sumber Internet :

([http://www.hkkbn.go.id/data/Documents/Pr0fil%2020Hasil%20Pendataan%202013.pdf](http://www.hkkbn.go.id/data/Documents/Pr0fil%202020Hasil%20Pendataan%202013.pdf), diakses pada 11 Mei 2016)

<https://kbhi.web.id/pelaksanaamhtml>

Mus_vuruka miskin di Rusunawu Pekunden Kola Semarang.

Jurnal (Jikus-Nomos/Volume 15, Nomor 1/Juni 2022/Pedoman Umum Program

Keluarga Harapan. 2016. Jakarta : Kementerian Sosial RI.

Nurisma 2021. Analisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Menteri Program Keluarga Harapan Di Desa Simpang Kola Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri

Walsra (2011) pelaksanaan program karang taruna dalam upaya - Jurnal

